

## SISTEM PENANGANAN PERILAKU INDISIPLINER SANTRI DALAM TINJAUAN ILMU BIMBINGAN DAN KONSELING (Studi Kasus di TMI Putra PP. Al-Amien Prenduan Sumenep)

*Yanto*

[yantosuhami@gmail.com](mailto:yantosuhaimi@gmail.com)

(STIDKIS Al-Mardliyyah Pamekasan)

### ABSTRAK

Perilaku indisipliner banyak ditemukan dalam dunia pendidikan termasuk pesantren. Terjadinya perilaku indisipliner di pesantren disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor latar belakang keluarga santri, faktor motivasi, dan pengaruh teman pergaulan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi penanganan perilaku indisipliner santri, terutama relevansinya dalam perspektif sistem bimbingan dan konseling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik bola salju (*snow ball sampling*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penanganan perilaku indisipliner santri dilakukan dengan membentuk Organisasi Santri (*Organtri*) yang dalam hal ini dilakukan oleh bagian Majelis Pertimbangan *Organtri* (*MPO*) dengan menerapkan sistem *gradual punishment*. Secara umum penanganan perilaku indisipliner di kalangan santri TMI Putra PP. Al-Amien relevan dengan sistem bimbingan dan konseling, dimana di dalam penerapan sistem *gradual punishment* terdapat kegiatan *pra-bimbingan* dan kegiatan *bimbingan*.

**Kata Kunci:** *Pesantren, Perilaku Indisipliner, Bimbingan Konseling*

### ABSTRACT

Disciplinary behavior is often found in the world of education, including Islamic boarding schools. The occurrence of disciplinary behavior in Islamic boarding schools is caused by many factors, such as students' family background factors, motivational factors, and the influence of friends. This paper aims to explain the implementation of handling student disciplinary behavior, especially its relevance in the perspective of the guidance and counseling system. The type of research used is qualitative using a case study approach, the informants in this study were selected using the snowball sampling technique. The results showed that the implementation of handling students' disciplinary behavior was carried out by forming a Santri Organization (*Organtri*) which in this case was carried out by the *Organtri* Consideration Council (*MPO*) section by implementing a *gradual punishment* system. In general, the handling of disciplinary behavior among TMI Putra PP students. Al-Amien is relevant to the guidance and counseling system, where in the implementation of the *gradual punishment* system there are *pre-guidance* activities and *guidance* activities.

**Keywords:** *Pesantren, Indisipliner Attitude, Counseling Guidance*

## Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam tertua dan unik dengan aneka karakteristiknya yang dimiliki Indonesia. Bahkan pesantren dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang spesifik di Indonesia.<sup>1</sup> Karakteristik yang dimiliki pesantren belum tentu dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam lainnya. Menurut Syamsul Ma'arif, karakteristik pesantren banyak berpengaruh dalam membentuk karakter manusia-manusia yang 'berwatak' khas, seperti: populis, *nerimo ing pandum*, suka berderma, ikhlas, serta watak-watak lainnya yang sangat jarang ditemukan dalam masyarakat modern yang cenderung kapitalistik seperti sekarang.<sup>2</sup> Selain itu pesantren sering disebut sebagai lembaga yang dapat memberikan pendidikan *akhlaq al-karimah* paling efektif kepada peserta didiknya (santri).<sup>3</sup>

Abdurrahman Wahid menjelaskan bahwa peran pesantren tidak hanya bersifat keagamaan belaka, tetapi ada yang bersifat kultural, sosial-ekonomis bahkan politik.<sup>4</sup> Pada sisi lainnya Nurcholis Madjid mengatakan bahwa secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-islam-an tetapi juga mengandung ke-*asli*-an Indonesia.<sup>5</sup> Hal lain yang menjadi kekhasan pesantren adalah adanya lima elemen pesantren yang saling berkaitan, yaitu; kiai, pondok sebagai asrama santri (pondok), masjid, pengajaran kitab-kitab Islam Klasik (kitab

kuning: kitab gundul), dan santri.<sup>6</sup> Mastuhu, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Ma'arif mengatakan bahwa pesantren memiliki nilai khas yang terdiri dari; (1) nilai teosentris, (2) sukarela dan mengabdikan, (3) kearifan, (4) kesederhanaan, (5) kolektivitas, (6) mengatur kegiatan bersama, (7) kebebasan terpimpin, (8) mandiri, (9) tempat mencari ilmu dan mengabdikan, (10) mengamalkan ajaran agama, dan (11) restu kiai.<sup>7</sup>

Namun di luar ke-khas-an tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya bahwa di dalam pesantren juga sering ditemukan terjadinya kekerasan kepada santri atau *bullying*. Kekerasan ini biasanya rawan terjadi pada saat pemberian sanksi kepada santri, seperti yang terjadi di pondok pesantren Urwatul Wutsqo Diwek Jombang. Di pesantren ini menerapkan hukum cambuk dengan rotan kepada santri yang melanggar peraturan pesantren.<sup>8</sup> Bahkan dalam jurnal yang ditulis oleh I Mutawakkil menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat pesantren yang menerapkan hukuman fisik dengan berdasarkan pada beberapa hadits dan pendapat ulama yang dianggap melegalkan penerapan hukuman fisik kepada anak (santri), meskipun pada sisi yang lain tidak sedikit pula para pakar yang tidak menghendaki adanya hukuman fisik dalam dunia pendidikan.<sup>9</sup>

*Bullying* di kalangan santri juga ditemukan di Pondok Pesantren Majlissat Ta'allum Kota Semarang. Di pesantren ini perilaku *bullying* ditengarai sebagai dampak fisik

<sup>1</sup> Manfred Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986), 7.

<sup>2</sup> Syamsul Ma'arif, "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren", *Ta'dib*, Vol. XV, No. 02, (Nopember 2010), 273-274.

<sup>3</sup> Elsa Hoerunnisa, dkk., "Strategi Pihak Pesantren dalam Mengatasi Santri yang Melakukan Perilaku Menyimpang", *Sosietas*, Vol. 7, No. 1, (2017), 323.

<sup>4</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 78.

<sup>5</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 3.

<sup>6</sup> Prasodjo, *Profil Pesantren, Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*, (Jakarta: LP3ES, 1974), hal. 103.

<sup>7</sup> Syamsul Ma'arif, "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren", *Jurnal Ta'dib*, Vol. XV, No. 2, (Nopember 2010), hal. 275.

<sup>8</sup> Chairul Latif, "Perlindungan Anak di Pesantren", *Makalah Disampaikan pada Diskusi P3D DPR RI, 13 Oktober 2015*, 2.

<sup>9</sup> I Mutawakkil, et al., "Hukuman Fisik di Pondok Pesantren", *KNAPPPTMA Ke-7*, (Maret 2018).

maupun psikis yang dialami oleh santri dari para seniornya sehingga memicu munculnya pelaku-pelaku kekerasan baru yang terinspirasi dari kekerasan yang pernah dialaminya.<sup>10</sup> Perilaku *bullying* yang baru-baru ini terjadi adalah di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Padang Panjang Sumatera Barat yang menyebabkan meninggalnya seorang santri yang bernama Robi Alhalim yang dikeroyok rekannya di kamar asrama selama kurun waktu 3 hari.<sup>11</sup> Kekerasan lain juga dialami oleh 9 (sembilan) orang santri yang tidak mengikuti kegiatan pengajian disebuah Pondok Pesantren di daerah Tasikmalaya Jawa Barat. Pesantren ini menerapkan hukuman cambuk sebanyak tiga kali untuk satu kali tidak ikut pengajian.<sup>12</sup>

Sebenarnya, perilaku *bullying* ini memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kebutuhan anak di masa yang akan datang, baik kepada pelaku *bullying* maupun kepada korbannya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Desiree yang dikutip oleh Ernawati sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Bagi korban tindakan *bullying* memberikan efek seperti *psychological well-being* yang rendah seperti perasaan tidak bahagia secara umum, *self-esteem* yang rendah dan perasaan marah dan sedih, penyesuaian sosial yang buruk seperti munculnya perasaan benci terhadap lingkungan sosial seseorang,

mengekspresikan ketidaksenangan pada sekolah, merasa kesepian, merasa terisolasi dan sering bolos, selain itu korban juga akan mengalami *psychological distress* di mana subjek memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, depresi dan yang paling buruk korban akan memiliki pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Korban akan mengalami *psysical unwellness* dimana subjek mengalami psikosomatis. *Bullying* ternyata tidak hanya memberi dampak negatif pada korban, melainkan juga pada para pelaku. Dari berbagai penelitian, *bullying* ternyata berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik dan tindakan bunuh diri.”

Sebagai lembaga pendidikan tertua, dalam perkembangannya pesantren terus mengalami pergeseran nilai, struktur dan pandangan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Di mana pada satu sisi pesantren dituntut untuk tetap istiqamah (*continual*) dengan kajian “kitab kuning”-nya dan mempertahankan nilai-nilai positif kepesantrenannya. Sedangkan pada sisi yang lain pesantren dituntut juga untuk menerima hal-hal baru yang dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin modern. Selain itu pesantren juga harus terbuka untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang yang diberlakukan secara umum oleh pemerintah, terutama UU Perlindungan Anak dan UU tentang HAM, sebagaimana dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep.

### Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil temuan di lapangan dianalisis menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles and

---

<sup>10</sup> M. Ghufron, “Takziran dan Relasi Kuasa di Pondok Pesantren (Studi Tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren *Majlissut Ta'allum* Kota Semarang)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2012.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *Aksi Pengeroyokan Santri Selama 3 Hari Berujung Maut di Ponpes*, <https://www.youtube.com/watch?v=G8jI321N9v0>

<sup>12</sup> Patroli, *Diduga Bolos Mengaji, 9 Santri Pesantren di Taksikmalaya Dianiaya*, <https://www.youtube.com/watch?v=I6kLycd4tHI>

<sup>13</sup> Ernawati, “Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan *Bullying* di Pesanten”, *Jurnal Abdi MOESTOPO*, Vol. 1, No. 2, (2018), 41.

Huberman, sedangkan pengolahan kebasahan adata menggunakan triangulasi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju berantai (*snow ball sampling*).<sup>14</sup> Penggunaan teknik ini dikarenakan penulis tidak memiliki informasi yang komprehensif tentang populasi penelitian, mengingat akses ke lokasi penelitian yang cukup terbatas. Pada awalnya penulis menemui alumni TMI PP. Al-Amien Preduan Sumenep, dan hanya mendapatkan kontak satu orang informan yaitu Ketua Majelis Pertimbangan Organtri (MPO) yang merupakan informan potensial. Dari informan tersebut penulis diarahkan pada beberapa informan lainnya.

Langkah *snow ball* ini dilakukan terus sampai penulis menemukan data yang cukup dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 15 (lima belas) orang, yakni 4 (empat) orang yang sedang menjabat sebagai pengurus Organisasi Santri (Organtri) TMI Putra Ponpes Al-Amien, 5 (lima) orang alumni TMI, dan 6 (enam) orang santri TMI Putra yang sedang menjalani sanksi. Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak ada aturan baku tentang jumlah partisipan (informan)<sup>15</sup> namun demikian para informan tersebut memberikan kontribusi yang cukup terkait data dan informasi yang penulis butuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

## Hasil Temuan dan Diskusi

### A. Organtri (Organisasi Santri) Sebagai Sistem

Organtri adalah singkatan dari organisasi santri Ma'had Tarbiyatul Mu'allimien Al-Islamiah (TMI) Al-Amien Preduan Sumenep. Organtri merupakan satu-satunya organisasi yang boleh hidup di

kalangan santri TMI Al-Amien Preduan. Organtri terdiri dari dua jenis, yaitu: Ikatan Santri TMI Putra disingkat ISMI, dan Ikatan Santri TMI Putri disingkat ISTAMA. Dalam implementasinya semua santri wajib berpartisipasi dalam kedua organisasi tersebut dengan aktif dan kreatif baik sebagai anggota maupun pengurus.

Secara garis besar struktur organtri Ma'had TMI Al-Amien Preduan terdiri dari dua badan, yaitu: *Dewan Pembina dan Dewan Penasehat*, dan *Badan Pelaksana Harian* yang terdiri dari Majelis Pertimbangan Organtri (MPO), Dewan Pengurus Organtri (DPO)<sup>16</sup>, dan Dewan Perwakilan Santri (DPS). Dewan Pembina Organtri terdiri dari; Dewan Riasah (Majlis Kiai), Dewan Pengasuh Putri, Majelis A'wan, dan Kepala-Kepala Biro di lingkungan Yayasan Al-Amien Preduan Sumenep. Sedangkan Dewan Penasehat Organtri terdiri dari; pengasuh Ma'had TMI, Mudir 'Aam (direktur), Mudir Ma'had (Putra/Putri), dan Mudir Marhalah (Putra/Putri).

Majelis Pertimbangan Organtri (MPO) merupakan "lembaga tertinggi" di lingkungan organtri yang berfungsi sebagai lembaga konsultatif (pembimbing dan penasehat) sekaligus sebagai lembaga yudikatif (pelaksana mahkamah) bagi para pengurus Organtri dan/atau santri yang melakukan pelanggaran berat. Sedangkan Struktur MPO terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, mahkamah ulya, dan anggota tetap yang bertugas sesuai departemennya masing-masing. Pengurus MPO terdiri dari dewan guru yang kompeten, diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Mudir Ma'had, Mudir 'Aam, dan Pengasuh Ma'had TMI.

---

<sup>14</sup> Michael Queen Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 89.

<sup>15</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 130.

---

<sup>16</sup> DPO terdiri dari 3 level, yaitu; Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan Pengurus Klub/Kelompok Santri.

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

Dalam pelaksanaannya MPO berhak untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada pengurus organtri setelah mendapatkan persetujuan dari Mudir Ma'had serta restu dari Mudir 'Aam (Direktur) dan Pengasuh Ma'had TMI. Sebagai pertanggung jawaban, evaluasi kinerja MPO diwajibkan menyelenggarakan musyawarah besar organtri yang terdiri dari Musyawarah Tengah Tahunan (Musteta) dan Musyawarah Tahunan (Musta) dengan agenda khusus.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah lembaga eksekutif dalam organtri pada tingkat pusat yang berfungsi sebagai pelaksana dari program-program organtri yang tertuang dalam Gabko.<sup>17</sup> DPP ini terdiri dari 1 (satu) kelompok pengurus harian, 5 (lima) departemen,<sup>18</sup> dan 23 bagian. Sistem Kerja Orgntri di TMI.

Dalam implementasinya Organtri memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu Pengasuh untuk memfasilitasi terwujudnya pendidikan yang sempurna kepada santri secara efektif dan efisien. Organtri ini dianggap sebagai "tangan kanan" pengasuh dalam rangka memenuhi segala bidang kebutuhan santri. Setiap bagian organtri sebagaimana dijelaskan di atas memiliki kantor masing-masing yang berada di lingkungan pondok pesantren.

Secara institusional organtri di lingkungan TMI Al-Amien Preduan memiliki tiga fungsi utama yang dikenal

---

<sup>17</sup> Gabko adalah singkatan dari Garis-Garis Besar Kebijakan Organtri, yang pada hakikatnya merupakan kumpulan aspirasi atau keinginan seluruh warga Ma'had (Kiai, Nyai, Guru dan Santri) yang disampaikan melalui musyawarah tahunan organtri dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pengurus organtri dalam satu masa khidmah.

<sup>18</sup> Yaitu, 1) Departemen Syariat dan Akhlaq (syarlaq), 2) Departemen Bahasa, 3) Departemen Disiplin dan Bi'ah, 4) Departemen Kepramukaan, dan 5) Departemen Koperasi dan Kewirausahaan.

dengan istilah Tri Fungsi Organtri yang terdiri dari:

- 1) Sebagai pembantu pengasuh dalam proses pendidikan. Artinya, bahwa organtri ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan dan mengontrol sistem pendidikan di lingkungan pesantren maupun dalam lingkungan sekolah khususnya dalam membina, membimbing para santri agar tumbuh dan berkembang menjadi santri yang diharapkan oleh pesantren.
- 2) Sebagai media latihan berorganisasi bagi para pengurus dan anggota. Artinya, bahwa di dalam organtri ini semua santri akan mendapatkan giliran untuk menjadi pengurus organisasi santri sehingga pada gilirannya mereka dapat melatih, mengasah, dan bahkan unjuk diri kemampuannya dalam bidang manajemen dan kepemimpinan.
- 3) Sebagai penyalur aspirasi seluruh penghuni ma'had. Artinya bahwa dengan adanya organtri ini seluruh santri dapat berpartisipasi baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Para santri dapat menyampaikan segala aspirasinya melalui organtri kepada pesantren.

Sedangkan fungsi kepengurusan organtri bagi para santri yang sedang mendapat giliran menjabat sebagai pengurus memiliki esensi sebagai berikut:

- 1) Sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa, sejak seorang santri di-*bai'at* menjadi pengurus organtri maka pada pundaknya telah diletakkan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia dia harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada para atasannya, yakni para mudir dan pengasuh, sedangkan di akhirat

dia mempertanggungjawabkan amanah tersebut kepada Allah.

- 2) Kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Artinya bahwa jabatan apapun yang diberikan oleh organtri kepada seorang santri maka jabatan tersebut menjadi sebuah kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi olehnya. Karena dalam penentuan jabatan tersebut oragantri tidak asal pilih dan asal tunjuk, melainkan ditentukan berdasarkan *track record* setiap santri sejak dari pertama kali meninjingkan kaki di lingkungan TMI. Sehingga jabatan yang diberikan organtri tersebut bisa dipastikan sangat sesuai dengan minat dan bakat masing-masing santri. Sebagai contoh, santri yang istiqamah berjamaah di masjid atau sering shalat tahajjud di masjid, kelak dia ditunjuk untuk menjadi pengurus bagian syari'ah yang kegiatannya selalu berkaitan dengan masjid.
- 3) Kesempatan atau peluang emas yang harus dipergunakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Artinya bahwa, santri yang menjabat sebagai pengurus organtri ini memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan sebagai bentuk pengabdian kepada pesantren, pengabdian kepada santri, kesempatan untuk melatih kemampuan kepemimpinan, dan lain-lain.

## B. *Gradual Punishment*/Sanksi Berjenjang di TMI

*Punishment* (hukuman), dalam Kamus Sosiologi dan Kependidikan dijelaskan bahwa hukuman (*punishment*) adalah suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum, yang dijatuhkan secara resmi oleh lembaga yang mempunyai

wewenang yang sah.<sup>19</sup> Ngalm Purwanto mengatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan yang lainnya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kesalahan atau kelemahan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Amir Daeni Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja serta menimbulkan nestapa, sehingga anak menyadari perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian hukuman dalam dunia pendidikan khususnya, adalah sesuatu yang diperbolehkan dimana hal itu dilakukan oleh orang yang berwenang disertai dengan tujuan untuk merubah perilaku anak didik (santri) menjadi lebih baik, sehingga hukuman itu tidak boleh diberikan dengan sembarangan. Dalam hal ini, secara khusus Imam Al-Ghazali sebagaimana diutip oleh Jajang Aisyul Muzakky, mengatakan sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Persyaratan dalam pemberian hukuman secara pedagogis ini, yaitu: *Pertama*, pendidik jangan sekali-kali mengobrol hukuman terhadap anak didik, karena hukuman itu sendiri akhirnya tidak bernilai apa-apa di mata anak-anak, dan anak akan kebal hukuman. *Kedua*, pendidik harus berhati-hati

---

<sup>19</sup> G. Karatasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, 337.

<sup>20</sup> Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-8, 182.

<sup>21</sup> Amir Daeni Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional), 1973, 146.

<sup>22</sup> Jajang Aisyul Muzakki, “Hakekat Hukuman dalam Pendidikan Islam”, *Halaqa: Islamic Educational Journal*, 1(2), 23-34. doi:<http://dx.doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242>.

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

dalam memberikan hukuman pada siswa. Apakah layak mendapatkan hukuman atau tidak? Dan apa bentuk hukumannya? *Ketiga*, pemberian hukuman harus dilakukan dengan cara terhormat. Artinya pendidik melakukan hukuman tersebut masih dalam jalinan kasih sayang dan tidak menggunakan kata-kata kasar”.

Lahirnya *gradual punishment* di lingkungan PP. Al-Amien Prenduan tidak semata-mata disusun secara tiba-tiba, tetapi disusun berdasarkan pada hasil kajian mendalam terhadap perkembangan beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, faktor psikologi anak, faktor psikologi orang tua, dan faktor tingkat pemahaman dan kejelian pengasuh PP. Al-Amien dalam mengambil sikap yang lebih konsiderans dengan nilai-nilai kepesantrenan yang merupakan hasil internalisasi nilai-nilai keislaman.

Tidak dipungkiri bahwa pada awal-awal tahun 90-an dan sebelumnya, sebelum lahirnya *gradual punishment* pemberian sanksi terhadap perilaku indisipliner menggunakan pemukulan baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan pesantren. Sistem pemukulan merupakan satu-satunya cara yang digunakan pesantren untuk memberikan sanksi kepada santri yang melanggar. Walaupun demikian, pemukulan tersebut tidak serta merta dilakukan secara bebas, tetapi terdapat ketentuan yang harus dipenuhi, misalnya: yang boleh melakukan pemukulan itu hanyalah asatidz, dan pemukulan tersebut tidak boleh dilakukan dalam keadaan emosi karena hal itu bisa menyebabkan ketidakadilan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap adanya tindak kekerasan yang

dilakukan oleh pengurus pesantren, misalnya adanya UU Perlindungan Anak dan UU tentang HAM. Dua undang-undang tersebut menjadi tantangan bagi Pesantren yang memberlakukan hukuman kekerasan kepada santri. Namun walaupun demikian, sampai sekarang ini tidak sedikit orang tua/wali santri yang menginginkan adanya sanksi seperti kala itu, bahkan tidak sedikit pula menyampaikan langsung kepada pengasuh agar sanksi itu menggunakan sistem pemukulan saja. Hal itu disampaikan oleh Ust. H. Moh. Hamzah Arsa.

### C. Tahap-Tahap Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi berjenjang (*Gradual Punishment*) kepada santri pelanggar peraturan TMI melalui tahapan berikut:

#### a) Tahap terjadinya perilaku indisipliner

Pada tahap ini merupakan tahap dimana suatu pelanggaran ditemukan dilakukan oleh santri baik dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan pesantren, dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan Organtri (MPO). Dalam kesehariannya, perilaku santri tidak terlepas dari *control* pengurus, baik *musahhil*, *musyrif* maupun wali kelas. Seluruh elemen pesantren mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri dengan memberikan keterangan yang sangat detail.

Dengan kata lain bahwa semua aktifitas santri mulai dari bangun tidur sampai tidur dan bangun lagi perilaku santri selalu dalam pengawasan pengurus Organtri. Tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh santri langsung dikenakan sanksi, tetapi untuk katagori pelanggaran ringan dan tidak dilakukan berulang-ulang, masih mendapatkan toleransi, yakni dengan memberikan peringatan dan pemahaman kepada santri, biasanya hal ini

sering ditemukan pada saat awal pelajaran, di mana banyak santri baru yang masih belum begitu memahami dan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan budaya pesantren.

b) Tahap pelaporan kepada MPO

Tahap pelaporan perilaku indisipliner ini dapat dilakukan oleh pengurus MPO sendiri, *musahhil*, *musyrif*, masyarakat sekitar, sesama santri, bahkan wali santri sendiri. Siapapun yang menemukan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh santri maka berhak dan wajib melaporkannya kepada bagian MPO. Sebagai seorang pelapor harus jujur dan adil dalam memberikan keterangan kepada MPO, mulai dari siapa pelakunya, kapan terjadi, dimana kejadiannya, dan seterusnya.

Semua keterangan yang disampaikan oleh pelapor akan direkam oleh Organtri dan menjadi dokumen rahasia Organtri, sehingga tidak ada pihak lain yang mengetahui suatu kejadian pelanggaran tertentu kecuali pihak-pihak yang dianggap berkepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Tahap ini dalam dunia bimbingan konseling berkaitan dengan Asas Kerahasiaan. Asas ini penting karena untuk menjaga dan melindungi conseli (santri pelanggar) dari perilaku negatif dari orang sekitarnya.

c) Tahap invstigasi dan introgasi

Tahap ini dilakukan di kantor MPO. Pada tahap ini pengurus MPO melakukan pemanggilan kepada santri yang dilaporkan melakukan perilaku indisipliner, yang bersangkutan diminta untuk menceritakan secara detail dan sejujurnya bagaimana dia melakukan suatu pelanggaran. Cerita tersebut ditulis pada Lembar Kronologi dengan menggunakan tulisan tangan sendiri yang

di dalamnya memuat kapan dan dimana perilaku indisipliner itu dilakukan, mengapa perilaku itu dilakukan, bersama siapa perilaku itu dilakukan, dan seterusnya.

Di dalam Draf Lembar Kronologi tersebut tercantum identitas diri, dan beberapa data diri yang berkaitan dengan keluarga dan pesantren, seperti; nama, kelas, nama orang tua, no HP orang tua dan alamat, nama musyrif, nama wali kelas. Tahap investigasi dan introgasi ini dilakukan oleh pengurus MPO yang terdiri dari para ustadz yang memiliki keahlian dan kemahiran dalam bidang tersebut, yakni memiliki kemahiran dalam bidang 5W-1H. Sehingga pada tahap ini akan diketahui apabila santri indisipliner tersebut melakukan kebohongan atau rekayasa dalam mengisi Draf Lembar Kronologi. Selain memuat identitas santri, di dalam Draf Lembar Kronologi ini juga memuat surat pernyataan dan sekaligus “sumpah” bahwa kronologi yang akan ditulis adalah kejadian yang sebenarnya, tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun.

Selain itu, dalam proses introgasi dan investigasi ini harus dilakukan dengan sikap penuh kasih sayang, mendidik, membimbing, dan menasehati. Sangat dilarang melakukan diskriminasi apalagi mengintimidasi yang bisa menyebabkan santri indisipliner merasa tertekan fisik maupun psikisnya. Lebih jauh dari itu, Draf Lembar Kronologi tersebut tidak boleh diketahui oleh pihak luar selain pejabat terkait yang memiliki kewenangan. Dengan kata lain bahwa dalam tahap ini proses investigasi dan introgasi ini dilakukan di tempat tertutup untuk menjaga kerahasiaan yang akan disampaikan oleh santri indisipliner.



Sehingga dengan sikap-sikap tersebut di atas sangat diharapkan santri akan menyadari kesalahannya dan bersedia bercerita dengan jujur, penuh rasa aman dan nyaman dalam menceritakan kronologi perilaku indisipliner yang dilakukan.

Dalam sesi ini sangat sesuai dengan asas bimbingan dan konseling secara umum, yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Sebagaimana Prayitno mengatakan:

“Segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberi bimbingan akan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak terutama penerima bimbingan (*klien*) sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya”.<sup>23</sup>

Asas kerahasiaan ini sangat sesuai dengan ajaran Islam, dimana di dalam al-Qur’an dijelaskan pada QS. al-Hujurat (49): 12. yang artinya:

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan*

---

<sup>23</sup> Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 115.

*janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. QS. al-Hujurat (49): 12.*

d) Pengajuan sanksi oleh MPO

Pada bagian ini merupakan tahap pengisian Draf Pengajuan Sanksi yang dilampiri dengan Draf Lembar Kronologi yang sudah diisi oleh santri indisipliner sebagai *track record* diri santri apabila melakukan pelanggaran berikutnya. Pengajuan sanksi ini dilakukan oleh MPO terhadap santri indisipliner yang diusulkan melalui Mahkamah Ulya untuk mendapatkan persetujuan dari Pemangku Kebijakan yang terdiri dari Mudirul Marhalah, Mudirul Ma’had, Mudirul ‘Aam, dan terakhir direstui oleh pengasuh.

e) Penjatuhan sanksi

Pada bagian ini adalah tahap dimana sanksi yang diusulkan oleh MPO dan disetujui oleh pemangku kebijakan dan akan dijatuhkan kepada santri indisipliner sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Sanksi Berjenjang yang berlaku. Penjatuhan sanksi ini diberikan secara adil dan merata kepada semua santri sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, meskipun santri tersebut adalah putra/putri para pemangku kebijakan sekalipun.

f) Pelibatan orang tua/wali santri

Pelibatan orang tua/wali santri dalam sistem pendidikan bukanlah hal yang “janggal”, akan tetapi hal itu

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pihak lembaga pendidikan sebagai ruang untuk memberikan peluang berpartisipasi kepada orang tua demi keberhasilan pendidikan anaknya. Tahap ini sebenarnya merupakan penegasan bahwa keluarga sebagai pendidik karakter yang paling utama, dimana hal itu dapat kita terjemahkan ke dalam dua hal penting, yaitu: *Pertama*, keluarga adalah pihak pertama dan utama yang paling penting dalam mempengaruhi pembentukan karakter anak; *Kedua*, Sedangkan tugas pesantren adalah memelihara, mengembangkan, menyempurnakan dan memperkuat nilai-nilai karakter yang sudah diajarkan di rumah, seperti sopan santun, rasa ta'dhim, tanggung jawab, jujur, dan lain-lain.

Mengamati beberapa tahapan di atas tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah proses bimbingan dan konseling meskipun hal itu tidak utuh dan tidak sempurna sebagaimana dalam teori para ahli. Menurut Umar dan Sartono, sebagaimana dikutip oleh Anas Salahuddin menyebutkan bahwa: "Proses bimbingan dan konseling itu dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu; kegiatan pra bimbingan, dan kegiatan bimbingan. Kegiatan pra bimbingan memuat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan, yaitu; *Pertama*, melakukan penulisan terhadap latar belakang konseli/klien (dilakukan di pesantren/sekolah). *Kedua*, dipanggil untuk wawancara, menjelaskan maksud dan tujuannya, yaitu untuk membantu bukan menghukum. *Ketiga*, mengunjungi keluarga konseli/klien. *Keempat*, memeriksa kesehatan konseli/klien (jika diperlukan). Sedangkan dalam proses bimbingan terdapat lima tahapan, yaitu: 1) *Tahap*

*identifikasi anak*, 2) *Tahap diagnosis*, 3) *Tahap prognosis*, 4) *Tahap pemberian terapi*, dan 5) *Tahap evaluasi dan follow-up*.<sup>24</sup>

Bagi penulis, meskipun langkah-langkah proses bimbingan dan konseling di atas tidak semuanya *tercover* dengan sempurna dalam implementasi *Gradual Punishment* di TMI Putra PP. Al-Amien namun hal tersebut merupakan fakta lapangan yang perlu diapresiasi dengan dua alasan sederhana, yaitu: *pertama*, penanganan perilaku indisipliner di TMI Putra PP. Al-Amien Prenduan dilakukan oleh *musyrif*, *musahhil*, dan wali kelas yang sama-sama berstatus santri dengan bekal dasar bimbingan dan pembinaan dari para santri senior dan pengasuh, jadi bukan dilakukan oleh seorang konselor profesional sebagaimana dikemukakan para pakar bimbingan dan konseling. *Kedua*, bahwa untuk menjadi *musyrif* dan *musahhil* terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh, tidak semua santri TMI Putra PP. Al-Amien bisa mengemban tugas sebagai *musyrif* maupun *musahhil*.

#### **D. Bentuk-Bentuk Perilaku Indisipliner Santri**

Terdapat beberapa bentuk perilaku indisipliner yang sering ditemukan di TMI Putra PP. Al-Amien Prenduan, yaitu: (1) merokok, (2) membawa handpone, (3) menjalin hubungan dengan santri putri (berpacaran), (4) mencuri, (5) bertengkar antar sesama santri. Perilaku-perilaku tersebut sebenarnya merupakan perilaku kenakalan remaja yang sudah sering dan bahkan biasa terjadi pada remaja di luar lingkungan pesantren. Namun tingkat kerawanannya lebih besar pada remaja yang

---

<sup>24</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 92-96.

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

berada di luar pesantren karena mereka lebih bebas bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan luar yang lebih berpotensi memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan remaja.

#### **E. Penyebab Munculnya Perilaku Indisipliner Santri**

Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya perilaku indisipliner di lingkungan TMI Putra PP. Al-Amien, yaitu:

- a. *faktor keluarga*. Lingkungan keluarga yang kondusif dan teratur dapat memberikan pembentukan karakter bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak. Dengan kata lain, bahwa anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang baik akan tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang baik, begitu juga sebaliknya. Karena keluarga dapat mendorong remaja berperilaku negatif apabila keluarga memiliki perhatian yang rendah terhadap anak, pengabaian terhadap anak, dan tidak ada kontrol yang kuat terhadap anak. Sehingga akibatnya anak akan mencari keluarga baru di luar yang dianggap lebih cocok dengan kebutuhannya.
- b. *faktor niat, motivasi, dan komitmen anak dan orang tua*. Islam sudah jelas mengajarkan bahwa setiap perbuatan itu harus dimulai dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala, lebih-lebih dalam hal menuntut ilmu baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Sederhananya begini, ketika niat kita ikhlas lillahi ta'ala maka di situ Allah akan melihat kita sedang berjuang menuntut ilmu di jalannya. Maka disinilah Allah akan memberikan pertolongan dengan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan perjuangan tersebut. Hal itu sudah dijanjikan Allah dan dapat kita kaitkan dengan hadits yang artinya: *Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu*

*maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga*. Hadits ini bagi penulis sangat erat sekali kaitannya dengan niat ikhlas.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam memondokkan anak adalah kekompakan, kesepahaman dan komitmen antara anak dan orang tua. Di TMI Putra PP. Al-Amien ini banyak santri yang melanggar itu diakibatkan karena mereka tidak betah di pondok karena alasan macam-macam, ternyata setelah ditelusuri mereka itu mondok di sini karena dipaksa oleh orang tuanya, bukan karena keinginannya sendiri. Sehingga, mereka mencari cara agar mereka bisa segera keluar dari pondok, yaitu dengan cara melakukan pelanggaran di pesantren.

Di sinilah dapat difahami betapa pentingnya menentukan sekolah bagi anak itu tidak hanya berdasarkan pada keinginan orang tua semata, tapi hal ini yang sampai saat ini masih menjadi pegangan masyarakat secara umum. Padahal harusnya pemilihan sekolah bagi anak itu ada kalanya melihat berdasarkan sudut pandang anak, hal itu penting karena nantinya anak yang akan menjalani proses pendidikannya. Sedangkan yang berlangsung di masyarakat, pengambilan keputusan dalam pendidikan anak masih dominan berdasarkan pada keputusan orang tua secara mutlak. Menurut Joyomartono, sebagaimana dikutip oleh Prihanto, ia mengatakan bahwa orang tua dalam melakukan pengambilan keputusan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu; pertimbangan nilai, pertimbangan materi, dan pertimbangan komunikasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Prihanto, RB. Soemanto, Bagus Haryono, "Keputusan Orang Tua dalam Menentukan Pendidikan bagi Anak di Kecamatan Ngemplak", Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

c. *pengaruh perilaku teman sepondok (pergaulan)*. Dalam pergaulan tidak terlepas hubungan timbal balik berupa proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Notoatmojo menyatakan bahwa faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku seseorang terdiri dari dua faktor, yaitu; *pertama*, faktor internal yaitu berupa kecerdasan, persepsi, motivasi, minat, emosi, dan sebagainya. *kedua* faktor eksternal yang meliputi objek, orang, kelompok, dan hasil-hasil kebudayaan yang di sajikan sasaran dalam mewujudkan bentuk.<sup>26</sup> Dari dua factor tersebut dapat dipahami bahwa perilaku indisipliner santri dapat terjadi karena factor bawaan dan dapat pula karena factor pengaruh dari teman sebaya yang tinggal bersamanya.

### Kesimpulan dan Saran

Sistem penanganan perilaku indisipliner santri di TMI Putra PP. Al-Amien Prenduan dilaksanakan melalui pembentukan organisasi yang disebut dengan Organisasi Santri (Organtri). Salah satu bagian yang paling erat kaitannya dengan perilaku indisipliner santri ini adalah bagian Majelis Pertimbangan Organtri (MPO). MPO ini merupakan bagian organtri yang mengatur dan mengontrol implementasi *gradual punishment* (sanksi berjenjang) yang berlaku di pesantren. *Gradual punishment* ini terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan sanksi sangat berat. Secara garis besar jenjang sanksi tersebut meliputi tiga bidang pelanggaran tata tertib pesantren, yaitu; pelanggaran terkait

bidang bahasa, bidang disiplin, dan bidang syari'ah.

Secara umum penanganan perilaku indisipliner di kalangan santri di TMI Putra PP. Al-Amien Prenduan memiliki relevansi dengan upaya-upaya bimbingan dan konseling, dimana di dalamnya terdapat kegiatan pra-bimbingan dan kegiatan bimbingan. Hal itu juga dapat dilihat dari adanya *musahhil*, *musyrif*, dan wali kelas yang merupakan bagian penting pesantren untuk melakukan pengontrolan, pembinaan, dan memberikan bimbingan kepada santri yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelibatan Organisasi Santri (Organtri) dalam penanganan perilaku indisipliner di kalangan santri TMI Putra PP. Al-Amien secara umum berdampak positif bagi penerapan kedisiplinan di pesantren. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akan terjadinya beberapa penyimpangan wewenang yang dilakukan oleh anggota Organtri. Sejauh data hasil temuan di lapangan, memang tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Organtri dalam menerapkan *gradual punishment* yang menjadi kebijakan pesantren. Namun demikian, otoritas yang besar yang diberikan kepada santri senior yang menjadi anggota Majelis Pertimbangan Organtri (MPO) sangat mungkin mendorong terjadinya *abuse of power*. Relasi yang tidak seimbang antara santri senior dan santri junior, sebagaimana disoroti oleh beberapa penelitian sebelumnya, sangat mungkin membuat implementasi hukuman terhadap santri yang terlibat perilaku indisipliner akan disalahgunakan. Dalam hal ini kontrol dan pengawasan dari para pemangku kebijakan pesantren dan majlis kiai menjadi faktor kunci yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran penerapan sanksi tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

---

*Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2013, 63-80.

<sup>26</sup> Sapara, Mensi M., Juliana Lumintang, Cornelius J. Paat, "Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Perempuan di Desa Ammat Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud", *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 3, September 2020, 1-16.

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ernawati. (2018) “Sosialisasi Meningkatkan Kesadaran Santri terhadap Tindakan Bullying di Pesanten”, *Jurnal Abdi MOESTOPO*, Vol. 1, No. 2.
- Ghufron, M. (2012). “Takziran dan Relasi Kuasa di Pondok Pesantren (Studi Tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren *Majlissut Ta'allum* Kota Semarang)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Hoerunnisa, Elsa dkk. (2017). “Strategi Pihak Pesantren dalam Mengatasi Santri yang Melakukan Perilaku Menyimpang”, *Sosietas*, Vol. 7, No. 1.
- I Mutawakkil, et al., “Hukuman Fisik di Pondok Pesantren”, *KNAPPPTMA Ke-7*, (Maret 2018).
- Indrakusuma, Amir Daeni. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Karatasapoetra dan Hartini. (2007). *Kamus Sosiologi dan Kependidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. Cet. Ke-2.
- Latif, Chairul. (2015). “Perlindungan Anak di Pesantren”, *Makalah Disampaikan pada Diskusi P3D DPR RI*.
- Ma'arif, Syamsul. (2010). “Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren”, *Ta'dib*, Vol. XV, No. 02.
- Madjid, Norcholis. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina.
- Muzakki, Jajang Aisyul. “Hakekat Hukuman dalam Pendidikan Islam”, *Halaqa: Islamic Educational Journal*, 1 (2), 23-34. doi:http://dx.doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242.
- Patton, Michael Queen. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasodjo. (1974). *Profil Pesantren, Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*, Jakarta: LP3ES.
- Prayitno. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Prihanto, RB. Soemanto, Bagus Haryono. (2013). “Keputusan Orang Tua dalam Menentukan Pendidikan bagi Anak di Kecamatan Ngemplak”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 2, No. 1.
- Purwanto, Ngalim. (1995). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-8.
- Salahudin, Anas. (2010). *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sapara, Mensi M., Juliana Lumintang, Cornelius J. Paat. (2020) “Dampak Lingkungan Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Remaja Perempuan di Desa Ammat Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud”, *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 3.
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LkiS.
- Ziemek, Manfred. (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M.
- CNN Indonesia, *Aksi Pengeroyokan Santri Selama 3 Hari Berujung Maut di Ponpes*, <https://www.youtube.com/watch?v=G8jI321N9v0>
- Patroli, *Diduga Bolos Mengaji, 9 Santri Pesantren di Taksikmalaya Dianiaya*, <https://www.youtube.com/watch?v=I6kLycd4tHI>